

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang Saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah Saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah Saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, Saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang Saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Juni 2025



Patimah

NIM: 211120018

ABSTRAK

Nama: **PATIMAH**, NIM: **211120018**, **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 melarang perangkat desa menjadi anggota partai politik. Kajian terhadap putusan ini relevan dianalisis melalui perspektif Fiqh Siyasah yang menekankan prinsip keadilan, kemashlahatan, dan pencegahan kerusakan dalam tata kelola pemerintahan.

Perumusan masalahnya adalah: (1) Apa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik? (2) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik?

Tujuan Penelitian: (1) menganalisis mengenai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik, (2) Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik dari sudut pandang Fiqh Siyasah.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Kemudian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif.

Mahkamah menolak permohonan uji materi Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perspektif Fiqh Siyasah, Putusan MK 76/PUU-XXI/2023 mendukung larangan Perangkat Desa menjadi anggota partai politik

Kata Kunci: Netralitas Perangkat Desa, Demokrasi Konstitusional, Fiqh Siyasah.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian
Munaqasyah
a.n. Patimah
NIM: 211120018**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH BANTEN
di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Patimah, NIM: 211120018 yang berjudul: ***Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah.***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 19 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Istiqomah, M.H.
NIP. 199402242020122004

**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-
XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota
Partai Politik Perspektif *Fiqh Siyasah***

Oleh :

PATIMAH
NIM : 211120018

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Pembimbing II,



Istiqomah, M.H.
NIP. 199402242020122004

Mengetahui,

Dekan

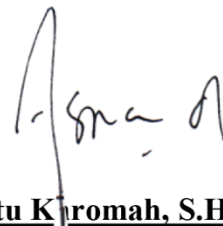
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



Atu Kromah, S.H., M.Si.
NIP. 196902141999032001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Patimah, NIM : 211120018 yang berjudul : *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah*, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 25 Juni 2025. Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juni 2025

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP.198408022011011008

Sekretaris Merangkap Anggota



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd
NIP.197506162006041008

Penguji I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H, M.Hum
NIP. 196909061996032002

Anggota,

Penguji II



Hikmatullah, M.Sy
NIP.198604252019031006

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Pembimbing II



Istiqomah, M.H.
NIP. 199402242020122004

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk dan teladan hidup yang mulia bagi seluruh umat manusia. Tanpa pertolongan dan ridho dari Allah SWT, Penulis tidak akan mampu melewati segala tantangan hingga mencapai tahap ini.

Skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan cinta Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Rohmat dan Ibu Aswati, yang telah menjadi sumber inspirasi, doa, dan dukungan tiada henti. Kasih sayang, pengorbanan, serta kesabaran mereka adalah fondasi kuat yang membimbing Penulis hingga mampu menuntaskan perjalanan akademik ini. Semoga Skripsi ini menjadi bukti nyata dari rasa terima kasih dan penghargaan Penulis atas segala jerih payah dan pengorbanan mereka.

Tidak lupa, Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk adik tercinta yaitu Alif Maulid Alfansyah, yang selalu menjadi semangat dalam setiap langkah. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi Adik Penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita dan mewujudkan impian.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah mengiringi perjalanan ini.

Jazakumullah Khairan Katsiran...!!!

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(المائدة : ٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Mā'idah: 8)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Patimah, lahir di Serang, Banten pada tanggal 1 Juli 2001, Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rohmat dan Ibu Aswati.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh Penulis adalah SD Negeri Pasir Buyut 1 dan lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Jawilan dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jawilan dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program (S1), dengan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan lulus pada tahun 2025.

Selama menjadi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Penulis pernah berhasil Mpublish Artikel di JURHIS (Jurnal Hukum Islam) UIN Banten. Artikel tersebut berjudul *“Menakar Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan: Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Konstitusional”*

Demikian catatan singkat mengenai riwayat hidup penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Univeraitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara. Sholawat dan salam Penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT. Dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah.***”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyuddin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Sekertaris Jurusan Arif Rahman, M.H. yang telah memberikan persetujuan dan bantuannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Dosen Pembimbing I dan Ibu Istiqomah, M.H. Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan bimbingan, memberikan arahan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama yang telah mengajar dan mendidik Penulis selama kuliah.
6. Seluruh keluarga, terutama kedua orang tua yang Penulis sayangi, Bapak Rohmat dan Ibu Aswati serta Adik tercinta Alif Maulid Alfansyah yang senantiasa memberikan segala do'anya yang tiada henti, memberikan motivasi dan nasihat kepada Penulis.
7. Kepada Sahabat, serta teman-teman seperjuangan HTN-A angkatan 2021 dan semua pihak yang terlibat dalam

penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Juni 2025

PATIMAH
NIM: 211120018

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS (PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH).	iv
SURAT PERETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat / Signifikansi Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	26
B. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Demokrasi Konstitusional.....	31

C. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah Dusturiyyah</i>	35
BAB III PERANGKAT DESA DAN <i>FIQH SIYASAH</i>	44
A. Perangkat Desa	44
1. Pengertian Perangkat Desa	44
2. Dasar Hukum Perangkat Desa	46
3. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Perangkat Desa	51
B. <i>Fiqh Siyasah</i>	61
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	61
2. Cabang-Cabang <i>Fiqh Siyasah</i>	64
3. <i>Siyasah Idariyyah</i> dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	74
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XXI/2023 TENTANG LARANGAN PERANGKAT DESA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	80
A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik.	80
1. Latarbelakang Kelurnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik	80
2. Landasan Hukum Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik	84

3. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>)	91
4. Petitum.....	98
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	99
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik.	117
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138